

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN MOJOANYAR**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik,

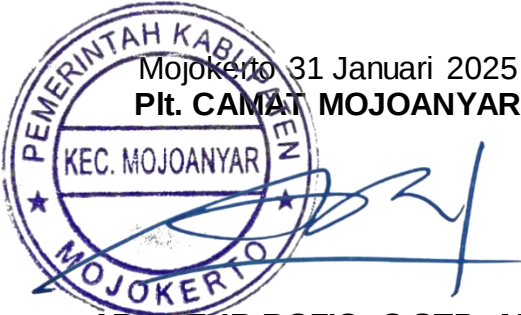
LKjIP merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kabupaten Mojokerto selama tahun anggaran 2024. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto serta bermanfaat bagi seluruh Masyarakat di lingkungan Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kabupaten Mojokerto.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Demikian semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya.

Mojokerto, 31 Januari 2025
Plt. CAMAT MOJOANYAR



ARIFATUR ROZIQ. S.STP., M.M.
Penata Tingkat I
NIP. 198607302006021001

DAFTAR ISI

HAL

KATA PENGANTARiii

DAFTAR ISIiv

IKHTISAR EKSEKUTIFv

BAB I 7

PENDAHULUAN 7

 A. Latar Belakang 7

 B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi..... 8

 C. Struktur Organisasi 12

 D. Sumber Daya Perangkat Daerah 12

 E. Isu Strategis 13

 F. Sistematika Penyajian 15

BAB II 17

PERENCANAAN KINERJA 17

 A. VISI DAN MISI 17

 B. Tujuan dan Sasaran 18

 C. Program 18

 D. Rencana Strategis 19

 E. Perjanjian Kinerja Tahun 2024..... 21

BAB III 23

AKUNTABILITAS KINERJA 23

 A. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi 23

 B. Realisasi Anggaran..... 36

 C. Tindak Lanjut Dan Evaluasi 38

BAB IV 40

PENUTUP 40

 A. Kesimpulan 40

 B. Saran 40

LAMPIRAN – LAMPIRAN 42

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban / akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LKjIP ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas-tugas dan memberikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak yang berkepentingan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas serta memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Di dalam penyusunan LKjIP memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan dengan target yang ingin dicapai dengan mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mojoanyar tahun 2024–2026 serta yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024.

Ada 1 (satu) Sasaran strategis yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal dengan indikator kinerja IKM Kecamatan dan ada empat (empat) kinerja lainnya yang tercantum di dalamnya, yaitu:

1. Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan dengan indikator kinerja Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan.
2. Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan dengan indikator kinerja Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti.
3. Meningkatnya Tata kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.

Ada 3 Indikator Kinerja yaitu:

- 3.1. Nilai SAKIP Kecamatan
 - 3.2. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
 - 3.3. Indeks Profesionalitas ASN
4. Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah dengan indikator kinerja Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan.

Dalam mencapai Indikator Kinerja Utama tersebut Kecamatan Mojoanyar menjalankan 3 Program, 7 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 2.697.656.026,00 serta realisasi anggaran sebesar Rp. 2.570.126.152,00 atau mencapai 95,27% dari yang telah ditetapkan di Perjanjian Kinerja.

Pada Sasaran Strategis Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal pada Indikator Kinerja IKM Kecamatan dengan target 90 terealisasi 97,87 sehingga capaian kinerjanya adalah 108,74%.

Pada kinerja lainnya yang pertama yaitu Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan pada Indikator Kinerja Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan dengan target 100% terealisasi 100% capaian kinerjanya adalah 100%.

Kinerja lainnya yang kedua yaitu Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan pada Indikator Kinerja Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dengan target kinerja 100 % terealisasi 100% capaian kinerjanya adalah 100%.

Kinerja lainnya yang ketiga yaitu Meningkatnya Tata kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel pada Indikator Kinerja yang pertama yaitu Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja 81 (A) terealisasi 80,30 (A) capaian kinerjanya adalah 99.14% Indikator Kinerja yang kedua yaitu Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah dengan target kinerja 97,5% terealisasi 95,27% capaian kinerjanya adalah 97,71%, Indikator Kinerja yang ketiga yaitu Indeks Profesionalitas ASN dengan target kinerja 85,15 terealisasi 85,46 capaian kinerjanya adalah 100,35%

Kinerja lainnya yang keempat yaitu Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah, pada Indikator Kinerja Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dengan target kinerja 2 inovasi terealisasi 2 inovasi capaian kinerjanya adalah 100%.

Dengan hasil capaian kinerja yang ada, diharapkan mampu menjadi sumber informasi serta referensi yang efektif bagi upaya perbaikan serta optimalisasi kinerja khususnya pada Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto serta bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto umumnya demi mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi maka setiap pejabat dan pelaksana wajib menyusun laporan kinerja yang bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *Good Governance* maka diperlukan adanya sebuah penerapan sistem pertanggungjawaban yang cepat, tepat, jelas dan terukur sehingga dapat terlaksana pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta bebas dari adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam praktiknya, penyelenggaraan pemerintahan pada kecamatan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten sangat kental dengan kegiatan yang menyangkut khalayak banyak baik sebagai penyusun maupun pelaksana kebijakan publik, sehingga dibutuhkan sebuah pengontrol yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan. Alat kontrol itu dapat berupa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satu ciri *Good Governance* menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah akuntabilitas. Penyelenggara Negara wajib menyampaikan pertanggungjawaban kinerja serta hasil-hasil yang telah dicapainya.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja bahwa Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk memberikan pertanggung jawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Penyampaian LKjIP Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Selain itu penyusunan LKjIP ini juga ditujukan sebagai upaya untuk

mengevaluasi kinerja Kecamatan Mojoanyar dalam menentukan upaya perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

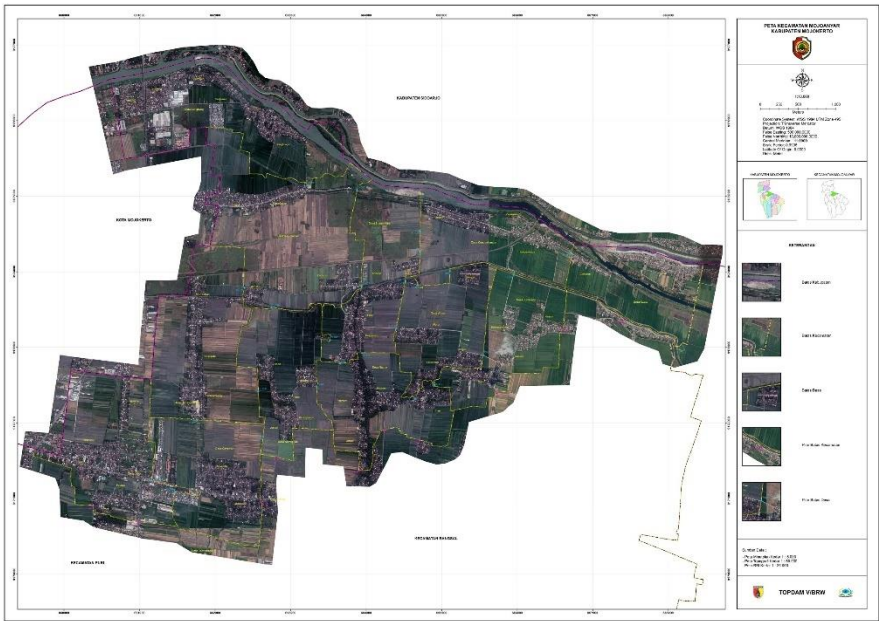
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto sebagai Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, maka kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan di Kabupaten Mojokerto, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mojokerto

Kecamatan Mojoanyar berada pada bagian tengah Kabupaten Mojokerto dengan luas wilayah 22,70 KM². Wilayah Kecamatan Mojoanyar rata-rata terletak pada ketinggian antara 35 meter di atas permukaan air laut. Adapun batas–batas wilayah kecamatan Mojoanyar sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Tarik Kab. Sidoarjo
- Sebelah Timur : Kecamatan Bangsal
- Sebelah Selatan : Kecamatan Puri
- Sebelah Barat : Kecamatan Magersari Kota Mojokerto



Gambar 1.1 Peta Kecamatan Mojoanyar

Secara administratif Kecamatan Mojoanyar terdiri dari 12 Desa, 44 Dusun, 65 RW, dan 267 RT. Adapun penduduk Kecamatan Mojoanyar sebanyak 50.045 jiwa dengan rasio jenis kelamin penduduk 101 (Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto per 2024) dengan rincian sebagai berikut:

Desa	Penduduk (Jiwa)	Distribusi Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jabon	5.794	11,58	2.272,16	101,60
Gayaman	5.294	10,58	2.439,63	103,93
Gebangmalang	4.466	8,92	1.876,47	104,86
Sumberjati	3.044	6,08	1.890,68	99,21
Kepuhanyar	4.795	9,58	1.933,47	105,09
Lengkong	7.734	15,45	3.468,16	98,00
Sadartengah	3.332	6,66	1.882,49	101,57
Ngarjo	3.290	6,57	1.981,93	102,29
Wunut	3.351	6,70	2.148,08	99,46
Jumeneng	3.249	6,49	2.006,56	94,43
Kewedenkembar	2.776	5,55	1.914,48	101,31
Kwatu	2.920	5,83	2.423,22	99,86
Kecamatan mojoanyar	50.045	100,00	2.206,00	101,06

Sumber Data Mojoanyar Dalam Angka

2. Tugas Pokok

- Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Mojoanyar mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

3. Fungsi

a. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, Camat mempunyai fungsi:

- 1) pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) pelaksanaan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- 3) pelaksanaan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- 4) pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan
- 6) memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- 8) pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

b. Dalam melaksanakan tugas mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Camat mempunyai fungsi:

- 1) pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;
- 2) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- 3) pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- 4) pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan

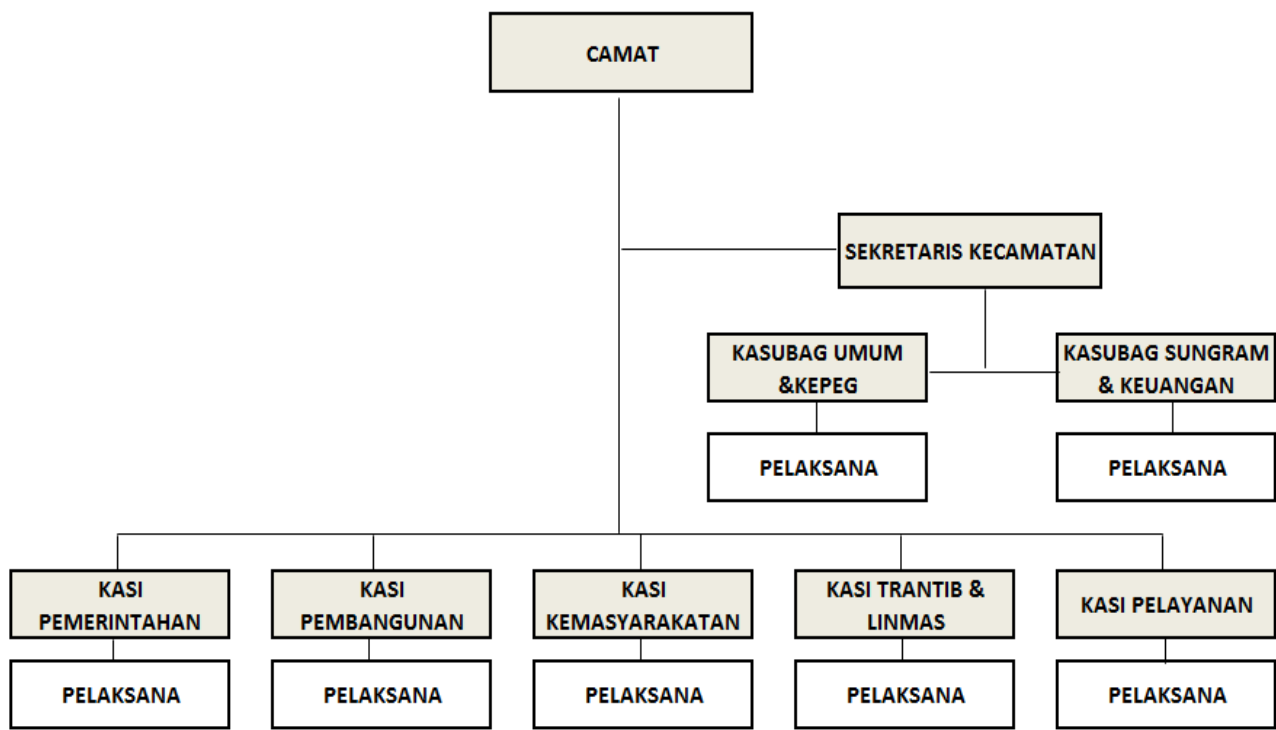
- 5) pelaksanaan pelaporan atas pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- c. Dalam melaksanakan tugas mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, Camat mempunyai fungsi:
- 1) pelaksanaan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - 2) pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - 3) pelaksanaan pelaporan atas pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kecamatan Mojoanyar Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto terdiri atas:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan;
 - a) Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Penyusunan program dan keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Kemasyarakatan;
- f. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- g. Seksi Pelayanan

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MOJOANYAR
(Peraturan Bupati Mojokerto No 80 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016)



D. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur dinamisator yang terpenting dalam suatu organisasi. Sebagai upaya dalam penyelenggaraan pemerintah dalam bidang kebijakan dan pembinaan administrasi pada masa yang akan datang maka diperlukan sumber daya manusia yang mencukupi secara kuantitas maupun kualitas dan dapat digambarkan sebagaimana daftar tabel sebagai berikut:

No	Jabatan	Pendidikan Formal							Jml
		SD	SLTP	SLTA	Dipl.	S1	S2	S3	
1	Camat	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekretaris Camat	-	-	-	-	-	1	-	1
3	Kepala Seksi	-	-	-	-	3	1	-	4
4	Kepala Sub Bagian	-	-	-	-	2	-	-	2
5	Staf	-	-	7	1	-	-	-	8
6	Tenaga Honorer	-	-	5	-	2	-	-	7
JUMLAH		-	-	12	1	6	3	-	22

Sumber data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kec. Mojoanyar

E. Isu Strategis

Kecamatan Mojoanyar sebagai penyelenggara pelayanan publik sudah selayaknya menjadikan pelayanan publik sebagai sebuah isu strategis, karena menyangkut tentang kebutuhan dasar yang harus didapatkan oleh masyarakat. dan tujuan utama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Berkaitan dengan permasalahan utama (*strategic issue*) serta isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Mojoanyar diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan kondisi eksternal kecamatan.

1. Kondisi Internal

Kondisi Internal Kecamatan dipengaruhi 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh managemen Kecamatan Mojoanyar.

a. Faktor Kekuatan Organisasi

- 1) Adanya dukungan dana dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam rencana kerja dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Mojoanyar.
- 2) Penempatan SDM yang sesuai antara keahlian yang dimiliki dengan kebutuhan Organisasi
- 3) Adanya pembagian tugas yang jelas dari level camat sampai level pelaksana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto.
- 4) Adanya sistem dan prosedur kerja yang jelas dan sudah tertuang dalam SOP yang dibakukan serta disosialisasikan.
- 5) Adanya dukungan teknologi informasi yang dapat mempercepat pelaksanaan tugas serta Sarana Prasarana yang memadai.

- 6) Adanya optimalisasi kualitas pelayanan melalui pengembangan Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dalam memberikan terobosan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

b. Faktor Kelemahan Organisasi

- 1) Kurang tertibnya sistem administrasi kepegawaian.
- 2) Adanya kekosongan Jabatan Pelaksana yang mempengaruhi kinerja OPD.
- 3) Kurang optimalnya sistem dan prosedur tata kearsipan.
- 4) Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki masih belum optimal.
- 5) Kurangnya pemahaman aparatur atas tupoksi yang dimilikinya.
- 6) Adanya beban kerja yang tidak merata

2. Kondisi Eksternal

Kondisi eksternal Kecamatan juga dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor strategis yaitu Faktor Peluang Organisasi dan Faktor Tantangan Organisasi, karena berada di luar lingkungan kecamatan, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Mojoanyar dan membutuhkan koordinasi serta kerjasama dengan Instansi terkait, namun demikian keberadaan faktor eksternal dapat berpengaruh terhadap upaya peningkatan kinerja organisasi.

a. Faktor Peluang Organisasi

- 1) Kecamatan Mojoanyar merupakan pusat lumbung pertanian sehingga mempunyai prospek yang baik untuk membuka peluang usaha-usaha produktif.
- 2) Kondisi Wilayah Kecamatan Mojoanyar juga termasuk daerah yang subur, sehingga merupakan daerah yang mempunyai prospek yang baik untuk pengembangan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
- 3) Adanya perbaikan dan pembangunan Infrastruktur baik yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto maupun oleh Pemerintah Desa yang dianggarkan dari Dana Desa seperti pembangunan dan perbaikan jalan poros, jalan lingkungan, jalan usaha tani dan jembatan, tentunya sangat berpengaruh terhadap kegiatan transportasi, Pembangunan Jamban dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat serta dapat menarik investor untuk menanamkan investasinya ke kawasan Mojoanyar khususnya dikawasan utara Mojoanyar sebagai kawasan industri. Dengan munculnya kawasan industri seperti ini akan menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran.
- 4) Keadaan masyarakat yang kondusif berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan dalam segala bentuk baik pembangunan fisik maupun mental spiritual.

b. Faktor Hambatan / Tantangan Organisasi

- 1) Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

- 2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian, ketertiban dan keamanan lingkungan.
- 3) Terdapat aparat yang kurang memahami penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga perlu banyak dilakukan pelatihan dan pembinaan khususnya SDM yang ada pada Perangkat Desa.
- 4) Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang.
- 5) Kurangnya pemahaman dan pemanfaatan Digitalisasi yang mengharuskan segala aktifitas di Pemerintahan menyebabkan segala Transaksi melakukan metode non tunai.

F. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kecamatan Mojoanyar selama tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) 2024 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mojoanyar Tahun 2024 sesuai Permenpan Nomor 53 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi. Selain itu juga berisi tentang dasar hukum dan sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtiar perjanjian kinerja tahun kepada yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

1. Capaian Kerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
8. Realisasi Anggaran,

Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan, dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Visi Dan Misi

Dalam Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kabupaten Mojokerto agar lebih terarah, berhasil guna, dan berdaya guna, serta untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik demi mendukung keberhasilan pembangunan nasional, Bupati Mojokerto telah menetapkan visi, misi, dan strategi yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Visi sebagai salah satu komponen perencanaan strategis, adalah pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan untuk berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif, visi juga merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Adapun visi Bupati Mojokerto adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG MAJU, ADIL DAN MAKMUR MELALUI PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA”

Kecamatan Mojoanyar sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto termasuk dalam misi Bupati Mojokerto yang ke 3 (tiga) yaitu:

“MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERINTEGRITAS, AKUNTABEL, BERSIH, TRANSPARAN”

Dengan mengemban misi tersebut Kecamatan Mojoanyar sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah yang berhadapan langsung kepada masyarakat diharapkan mampu memiliki kepribadian yang bersih dan kompetensi tinggi yang dapat diandalkan dalam perannya sebagai pelayan masyarakat, sehingga sanggup memberikan pelayanan prima bagi masyarakat dalam segala sektor sesuai kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto khususnya pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Dalam rangka melaksanakan misi tersebut maka perlu disusun sebuah acuan kerja yang memiliki arah, kegiatan dan program kerja yang sistematis dan terukur yang tertuang dalam sebuah Rencana Strategis selama 5 Tahun (Renstra) dari tahun 2021–2026. Dalam mengawal melakukan *action* yang lebih terukur lagi dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang akan dilakukan evaluasi setiap akhir tahunnya.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dan harus tercapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan memiliki tujuan berarti Kecamatan Mojoanyar memiliki goal yang harus tercapai dalam melaksanakan kegiatan yang diamanahkan sehingga memiliki acuan yang jelas dalam melayani masyarakat. Rumusan tujuan Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu suatu kondisi yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan dalam mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran di dalam perencanaan strategis untuk mewujudkan misi Kecamatan Mojoanyar, ada 1 sasaran yaitu

“Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal”

C. Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu instansi pemerintah untuk mendapatkan hasil yang berguna demi terwujudnya sasaran, tujuan serta visi dan misi dari instansi pemerintah itu sendiri. Program sendiri juga mempunyai sebuah indikator penentu sehingga output ataupun outcome hasil dari sebuah program dapat terukur dengan jelas. Adapun rumusan program Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto terhadap sasaran dan kinerja lainnya yang dimiliki, yaitu: Sasaran **“Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal “**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto
Indikatornya adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Indikatornya adalah Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Indikatornya adalah Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan

D. Rencana Strategis

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berisi tujuan, sasaran, dan kebijakan Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Rencana strategis Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto. Renstra Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 terdiri dari sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai selama 5 tahun mendatang. Secara Garis besar Renstra Kecamatan Mojoanyar memuat tujuan, sasaran, Program / Kegiatan / Sub Kegiatan serta Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Renstra 2021-2026

TUJUAN : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik					
SASARAN 1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih Dan Transparan					
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan keuangan bulanan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Bimtek Peningkatan ASN yang dilaksanakan
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
				Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas

					kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan BBM Kendaraan Operasional selama 12 Bulan dan Jumlah service serta penggantian suku cadang Mobil Dinas
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara dengan baik
SASARAN 2 : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal					
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

Sumber data Renstra 2021-2026

E. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sebagai implementasi dari Rencana Strategis Kecamatan Mojoanyar pada tahun 2024 dijabarkan ke dalam Rencana Tahunan (Renja) 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya Renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Perjanjian kinerja dibuat dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, dan bertujuan untuk mewujudkan target kinerja yang harusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja. Dalam lampiran perjanjian kinerja Kecamatan Mojoanyar Tahun 2024, tertuang Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target pada tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN MOJOANYAR KABUPATEN MOJOKERTO

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terwujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan		89

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		100%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti		100%
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 (A)
		3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	97,5%
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	85,15 (Tinggi)

4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi
---	---	---	-----------

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 2.360.380.986.00	APBD 2024
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 28.000.000,00	APBD 2024
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 205.800.000,00	APBD 2024

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN MOJOANYAR KABUPATEN MOJOKERTO**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	90

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 (A)
		3.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	97,5%
		3.3 Indeks Profesionalitas ASN	85,15 (Tinggi)
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 2.472.906.076,00	P APBD 2024
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 27.590.850,00	P APBD 2024
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 197.159.100,00	P APBD 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian indikator kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan.

Pengukuran capaian indikator kinerja sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Capaian kinerja yang dibahas dalam bagian ini meliputi capaian kinerja sasaran strategis dan akuntabilitas keuangan. Terkait dengan capaian kinerja Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, dipaparkan pencapaian atas indikator kinerja utama dan hal-hal berkaitan dengan capaian tersebut.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Mojoanyar tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah disampaikan dalam perjanjian kinerja pada tahun 2024 beserta realisasinya.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menetapkan analisis pencapaian kinerja, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah beserta petunjuk pelaksanaannya telah menetapkan standart penilaian dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Rentang Capaian		Kategori Capaian
91% s.d.≤ 100%	:	Sangat tinggi
76% s.d.≤ 90%	:	Tinggi
66% s.d.≤ 75%	:	Sedang
51% s.d.≤ 65%	:	Rendah
≤ 50%	:	Sangat rendah

1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT KINERJA
1	Terwujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	90	97,87	108,74%	Sangat Tinggi

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT KINERJA
1	Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		100 %	100%	100%	Sangat Tinggi
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti		100 %	100%	100%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Kecamatan	81	80,30	99.14%	Sangat Tinggi
		3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	97,5%	95,27%	97,71%	Sangat Tinggi
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	85,15	85,45	100,35%	Sangat Tinggi
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		2 Inovasi	2 Inovasi	100%	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel di atas, realisasi capaian kinerja Kecamatan Mojoanyar untuk tahun 2024 secara keseluruhan berada pada predikat **Sangat Tinggi**. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui faktor-faktor keberhasilan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan. Analisis ini juga berguna untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan sebagai masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024. Adapun realisasi kinerja Kecamatan Mojoanyar dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Sasaran Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal

Sasaran utama ini diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan dengan target 90 dan realisasi 97,87. Capaian kinerjanya sebesar 108,74%, yang masuk dalam kategori **Sangat Tinggi**. Hasil ini menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kecamatan Mojoanyar telah dilaksanakan secara optimal, bahkan melebihi target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan kualitas pelayanan yang responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah kecamatan meningkat.

b. Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan

Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan ditunjukkan melalui indikator persentase pelayanan sesuai standar dengan target dan realisasi 100%. Dengan capaian kinerja 100% dan predikat **Sangat Tinggi**, hal ini menunjukkan bahwa seluruh prosedur pelayanan telah dilaksanakan sesuai standar operasional yang berlaku. Keberhasilan ini mencerminkan kepatuhan aparatur terhadap regulasi dan prosedur, serta memberikan jaminan kualitas layanan kepada masyarakat.

c. Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan

Kinerja lainnya terkait fasilitasi dan koordinasi pemerintahan ditunjukkan dengan indikator persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti. Dengan target dan realisasi sebesar 100%, capaian kinerja 100% dan predikat **Sangat Tinggi** berhasil diraih. Capaian ini menunjukkan efektivitas dalam koordinasi lintas sektor serta kemampuan pemerintah kecamatan dalam merespons dan menindaklanjuti hasil-hasil koordinasi, yang berdampak positif pada kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

d. Tata Kelola Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel

Tata kelola birokrasi diukur melalui tiga indikator utama. Pertama, Nilai SAKIP Kecamatan dengan target 81 dan realisasi 80,30, menghasilkan capaian kinerja 100,87% dengan predikat **Sangat Tinggi**. Ini menunjukkan pengelolaan kinerja birokrasi yang sangat baik, dengan fokus pada efektivitas dan efisiensi. Kedua, Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah dengan target 97,5% dan realisasi 95,27%, mencapai 102,34%. Capaian ini mengindikasikan kemampuan kecamatan dalam mengelola anggaran secara optimal dan akuntabel. Ketiga,

Indeks Profesionalitas ASN dengan target 85,15 dan realisasi 85,45, menghasilkan capaian kinerja 99,64%. Hal ini mencerminkan tingkat profesionalisme dan kompetensi ASN yang tinggi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

e. Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi

Optimalisasi kualitas pelayanan dilakukan melalui pengembangan inovasi. Kecamatan Mojoanyar berhasil merealisasikan dua inovasi sesuai target, yaitu KECIPUT EMAS (Kecamatan Cepat untuk Tanggap terhadap Jasa Layanan Administrasi Publik kepada Masyarakat) dan KUSIR KERETA KENCANA (Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Mitigasi dan Penanganan Kecamatan Rentan Bencana). Kedua inovasi ini terealisasi 100% dan mendapat predikat Sangat Tinggi. KECIPUT EMAS berfokus pada percepatan layanan administrasi publik, sehingga memperpendek waktu pelayanan dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Sementara itu, KUSIR KERETA KENCANA bertujuan memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan kecamatan dalam menghadapi potensi bencana, yang penting untuk menjaga stabilitas dan keselamatan masyarakat.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Tabel 3.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET 2024	REALISASI	
					2023	2024
1	Terwujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan		90	88,69	97,87
NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA LAINNYA		TARGET	REALISASI	
					2023	2024
1	Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		100%	100%	100%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%
3	Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Kecamatan	81	79,10	80,30
		3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	97,5%	97,42%	97,27%
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	85,15	85,14	85,46

4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi	2 Inovasi	2 Inovasi
---	---	---	-----------	-----------	-----------

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET 2023	REALISASI	
					2023	2024
1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan	1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	-
		2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78	79,10	80,30
2	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	1	IKM Kecamatan	89	88,69	97,87
		2	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	100%	100%	100%
		3	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti kecamatan dalam satu tahun	100%	100%	100%
		4	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi	2 Inovasi	2 Inovasi
3	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	1	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	92%	97,42%	95,27%
		2	Indeks Profesionalitas ASN	85	85,14	85,15
		3	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	-

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi dan capaian Kecamatan Mojoanyar di beberapa indikator kinerja tergolong baik dari tahun sebelumnya, dengan hasil realisasi yang selalu melebihi dari target yang ditentukan.

a. Pelayanan Publik yang Optimal

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan menunjukkan peningkatan signifikan dari 88,69 pada tahun 2023 menjadi 97,87 pada tahun 2024. Capaian ini bahkan melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2024, yaitu 90. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Kecamatan Mojoanyar. Kinerja yang melebihi target ini menunjukkan adanya upaya yang berhasil dalam meningkatkan kepuasan masyarakat melalui pelayanan yang lebih baik.

b. Pelayanan Sesuai Standar

Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan tetap konsisten di angka 100% pada tahun 2023 dan 2024. Konsistensi ini menunjukkan bahwa Kecamatan Mojoanyar telah mampu mempertahankan standar pelayanan publik yang

tinggi. Keberhasilan dalam mempertahankan pencapaian ini juga menandakan adanya sistem pelayanan yang telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

c. Fasilitas dan Koordinasi Pemerintahan

Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti juga mencapai 100% di kedua tahun tersebut. Hal ini menunjukkan kinerja yang stabil dan efektivitas dalam penanganan hasil koordinasi. Tingkat penindaklanjutan yang optimal mencerminkan kemampuan Kecamatan Mojoanyar dalam menjaga sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait dalam menjalankan pemerintahan.

d. Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Akuntabel

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan menunjukkan peningkatan dari 79,10 pada tahun 2023 menjadi 80,30 pada tahun 2024. Meskipun belum mencapai target 81, peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek akuntabilitas kinerja. Selain itu, persentase realisasi anggaran perangkat daerah juga mengalami perbaikan dari 97,42% pada tahun 2023 menjadi 95,27% pada tahun 2024, mendekati target 97,5%. Ini menunjukkan pengelolaan anggaran yang semakin efisien.

Indeks Profesionalitas ASN mengalami lonjakan signifikan dari 85,14 pada tahun 2023 menjadi 85,46 pada tahun 2024, melebihi target 85,15. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas dan kompetensi ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional.

e. Inovasi Pelayanan

Dalam hal inovasi, Kecamatan Mojoanyar berhasil mempertahankan jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi sebanyak dua inovasi pada tahun 2023 dan 2024. Konsistensi ini menunjukkan komitmen Kecamatan dalam mengembangkan inovasi yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi pelayanan publik.

f. Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan

Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada tahun 2023 data tidak tersedia data untuk tahun 2024 tidak tersedia, sehingga perbandingan pada indikator ini tidak dapat dilakukan. Ketiadaan data ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam dokumentasi dan pelaporan capaian kinerja di masa mendatang.

Ada perbedaan mencolok antara Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan 2024 terletak pada jumlah sasaran dan indikator kinerja. Pada tahun 2023 terdapat 3 sasaran dengan 11 indikator kinerja, sementara pada tahun 2024 hanya terdapat 1 sasaran dengan 1 indikator kinerja. Perbedaan struktur ini menyebabkan keterbatasan dalam

melakukan perbandingan yang menyeluruh antara kedua tahun, karena tidak semua indikator dapat dibandingkan secara langsung.

3. Perbandingan Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Akhir Di RENSTRA

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RENSTRA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	REALISASI S/D SAAT INI (2024)	TINGKAT KEMAJUAN
1	Terwujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan		83	97,87	117,91%

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	REALISASI S/D SAAT INI (2024)	TINGKAT KEMAJUAN
1	Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		85%	100%	117,6%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti		85%	100%	117,64%
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Kecamatan	80	80,30	100,3%
		3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	100%	95,27%	95,27%
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	85	85,46	100,5%
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		-	2 Inovasi	0

Berikut adalah analisis perbandingan kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target akhir yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2026:

1. Kinerja Pelayanan Publik yang Optimal

Realisasi IKM Kecamatan telah melampaui target akhir RENSTRA sebesar 83, dengan capaian saat ini mencapai 97,87. Tingkat kemajuan mencapai 117,91%, menunjukkan bahwa pelayanan publik di tingkat kecamatan telah berjalan dengan sangat baik. Capaian ini mengindikasikan adanya perbaikan signifikan dalam kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Keberhasilan ini dapat dipertahankan dengan menjaga standar layanan dan mengidentifikasi area yang masih memerlukan peningkatan untuk mempertahankan tingkat kepuasan yang tinggi.

2. Kinerja Lainnya

Kinerja lainnya mencakup aspek pelayanan sesuai standar, fasilitasi dan koordinasi pemerintahan, serta tata kelola birokrasi pemerintahan. Pada aspek pelayanan sesuai standar, seluruh pelayanan telah tercapai 100%, melampaui target RENSTRA sebesar 85%. Capaian ini menunjukkan kinerja pelayanan yang optimal dan sesuai standar, dengan tingkat kemajuan sebesar 117,65%. Keberhasilan ini perlu dijaga melalui pembaruan standar pelayanan sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat agar kualitas layanan tetap relevan dan berkualitas.

Selanjutnya, dalam hal fasilitasi dan koordinasi pemerintahan, persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti juga telah mencapai 100%, melampaui target 85%. Hal ini mengindikasikan proses koordinasi yang efektif dan optimal. Fokus ke depan adalah memastikan kualitas tindak lanjut koordinasi agar memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada aspek tata kelola birokrasi pemerintahan, terdapat tiga indikator utama. Pertama, nilai SAKIP Kecamatan telah melebihi target 80 dengan capaian 80,30 dan tingkat kemajuan 100,37%. Ini mencerminkan implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berjalan sangat baik. Kedua, persentase realisasi anggaran perangkat daerah mencapai 95,27% dengan tingkat kemajuan 95,27%, menunjukkan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Ke depan, tantangan utamanya adalah mempertahankan efisiensi ini sembari memastikan seluruh output yang direncanakan tercapai. Ketiga, indeks profesionalitas ASN juga telah melampaui target 85 dengan capaian 85,46 dan tingkat kemajuan 100,54 %. Capaian ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan telah memiliki tingkat profesionalitas yang tinggi. Namun, untuk menjaga dan meningkatkan kualitas ini, diperlukan pelatihan berkelanjutan dan pengembangan kapasitas ASN.

Secara keseluruhan, kinerja lainnya menunjukkan capaian yang sangat positif, dengan sebagian besar indikator telah melampaui target RENSTRA. Tantangan ke depan terletak pada upaya menjaga konsistensi kinerja, meningkatkan kualitas hasil koordinasi, serta memastikan efisiensi penggunaan anggaran yang berkelanjutan.

3. Inovasi Pelayanan

Terdapat dua inovasi yang telah terinternalisasi dan tersosialisasi. Namun, tingkat kemajuan tercatat 0% karena belum ada target kuantitatif dalam RENSTRA. Perlu penetapan target yang jelas agar pengembangan inovasi dapat diukur dan diarahkan untuk memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pelayanan publik.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI (2024)	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
1	Terwujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	97,87	-	

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		REALISASI (2024)	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
1	Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		100%	-	
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti		100%	-	
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Kecamatan	80,30	-	
		3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	95,27%	-	
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	85,46	-	
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		2 Inovasi	-	

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Sasaran Kinerja

a. Sasaran “ Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal “

Pada indikator kinerja Nilai IKM, terdapat target 90 dengan realisasi 97,87 Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Kecamatan Mojoanyar

dengan cara melakukan survei menggunakan aplikasi Sukma-E Jatim yang ditampilkan menggunakan QR Code, sehingga nilai tersebut didapat dengan perhitungan Aplikasi Sukma-E Jatim (<https://sukma.jatimprov.go.id/login>). Dengan memberikan penilaian Persepsi terhadap 9 Unsur Pelayanan yaitu : Persyaratan, Sistem/Mekanisme/Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Pelayanan, Kompetensi Pelaksanan, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan / Saran / Masukan dan Sarana Prasarana.

Untuk memperoleh Nilai SKM digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai SKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

Tabel 1 : TABEL INTERVAL NILAI SKM

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Nilai IKM Kecamatan Mojoanyar Tahun 2024 mencapai 97,87 dan termasuk dalam kategori A **“SANGAT BAIK”**.

- b. Kinerja Lainnya ke 1 yaitu Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan.

Seluruh Pelayanan yang masuk di Kecamatan Mojoanyar semua terlayani sesuai standar pelayanan. Indikator kinerja Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan, target 100% terealisasi 100%. Dengan formulasi perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah pelayanan yang terlayani sesuai standart pelayanan}}{\text{Keseluruhan jumlah Pelayanan}} \times 100\% = \frac{4.874}{4.874} \times 100 \% = 100 \%$$

- c. Kinerja Lainnya ke 2 yaitu Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan.

Indikator kinerja Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti, terdapat target 100% terealisasi 100%. Dengan formulasi perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Keseluruhan jumlah koordinasi}} \times 100\% = \frac{24}{24} \times 100\% = 100\%$$

Jumlah koordinasi yang ditindaklanjuti dari program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu:

- 1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa. Jumlah koordinasi yang ditindaklanjuti pada sub kegiatan ini ada 12 yaitu:
 - a) Asistensi Penyusunan LPJ Pemerintah Desa
 - b) Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa
 - c) Asistensi Penatausahaan Aset Pemerintah Desa
 - d) Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa se Kecamatan Mojoanyar
 - e) Asistensi Penyusunan APBDes dan PAPBDes
 - f) Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan Desa
 - g) Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pemerintahan Desa
 - h) Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes
 - i) Evaluasi rancangan peraturan desa tentang P-APBDes
 - j) Evaluasi rancangan peraturan desa tentang Pertanggungjawaban APBDes
 - k) Fasilitasi pengajuan ADD
 - l) Fasilitasi pengajuan DD
- 2) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa. Jumlah koordinasi yang ditindaklanjuti pada sub kegiatan ini ada 4 yaitu:
 - a) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
 - b) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Desa dan Kecamatan
 - c) Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Indeks Desa Membangun
 - d) Fasilitasi pengajuan BK-Desa
- 3) Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Jumlah koordinasi yang ditindaklanjuti pada sub kegiatan ini ada 4 yaitu:
 - a) Fasilitasi kegiatan Forkopimca
 - b) Pembinaan dan peningkatan Kapasitas Linmas Desa
 - c) Penyelenggaraan peringatan Hari Besar Nasional
 - d) Pemantauan, Pengamanan Wilayah dan penanganan konflik sosial

- 4) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan. Jumlah koordinasi yang ditindaklanjuti pada sub kegiatan ini ada 4 yaitu:
 - a) Fasilitasi penyaluran Bantuan Sosial
 - b) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
 - c) Fasilitasi kegiatan Keagamaan
 - d) Koordinasi dan Konsultasi kesejahteraan sosial
- d. Kinerja Lainnya ke 3 yaitu Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel. Ada 3 Indikator Kinerja yang terdapat dalam kinerja lainnya ke 3, yaitu:
 - 1) Nilai SAKIP Kecamatan

Nilai SAKIP Kecamatan Mojoanyar, dengan target 81 terealisasi 80,30 sehingga diperoleh capaian kinerja 99,14%.

Realisasi Nilai SAKIP tidak bisa lebih tinggi karena ketidakselarasan antara dokumen Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja yang telah disusun. Nilai SAKIP didapat dari Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dilakukan penilaian oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto. Nilai SAKIP Kecamatan Mojoanyar masuk dalam kategori “BB” dengan interpretasi “Memuaskan”, Terdapat gambaran bahwa Kecamatan Mojoanyar dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas.
 - 2) Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah

Persentase Realisasi Anggaran Kecamatan Mojoanyar, dengan target 97,5% terealisasi 95,27% sehingga diperoleh capaian kinerja 97,71%. Anggaran Kecamatan Mojoanyar tahun 2024 sebesar Rp. 2.697.656.026,00 dengan Realisasi Anggaran Rp. 2.570.126.152,00 Sehingga didapat Persentase Realisasi Anggaran Perangkat daerah sebesar

$$\frac{\text{Rp. 2.570.126.152}}{\text{Rp. 2.697.656.026}} \times 100\% = \mathbf{95,27\%}$$
 - 3) Indeks Profesionalitas ASN

Nilai IP ASN Kecamatan Mojoanyar Tahun 2024 dengan target 85,15 terealisasi 85,46 sehingga diperoleh capaian kinerja 100,35%.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam meningkatkan nilai IP ASN yaitu dengan memrintahkan PNS Kecamatan Mojoanyar untuk mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi pegawai Kecamatan Mojoanyar melalui

- Pelatihan / Diklat / Bimtek maupun Seminar dalam meningkatkan IP ASN Kecamatan Mojoanyar
- e. Kinerja Lainnya ke 2 yaitu Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambahan
- Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dengan target 2 inovasi dan terealisasi 2 inovasi sehingga diperoleh capaian kinerja 100%. Inovasi yang dikeluarkan Kecamatan Mojoanyar dalam optimalisasi kualitas pelayanan:
1. “KECIPUT EMAS (Kecamatan Cepat untuk Tanggap terhadap Jasa Layanan Administrasi Publik kepada Masyarakat)” sesuai dengan Surat Keputusan Camat Mojoanyar Nomor 188.45/09/416-318/2022 adalah suatu inovasi kecamatan Mojoanyar yang berbasis layanan publik untuk memangkas atau mempercepat suatu layanan kepada masyarakat karena adanya suatu hambatan karena adanya hirarki layanan dengan cara mengintegrasikan suatu layanan dimaksud dengan aplikasi yang dibuat oleh kabupaten Mojokerto yaitu e-office.
 2. “KERETA KUSIR KENCANA (Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Mitigasi dan Penanganan Kecamatan Rentan Bencana)” sesuai dengan Surat Keputusan Camat Mojoanyar Nomor 188.45/11/416-318/2022 adalah inovasi yang timbul karena masalah kecamatan terkait bencana yang tetap terjadi meskipun infrastruktur pembenahan banjir sudah dibenahi berkali–kali.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Terwujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	97,87%	27.324.850	0,96%

No	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	27.324.850	0,96%

2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti		100%	194.395.100	1,40%
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Kecamatan	99,14%	11.922.200	2,14%
		3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	95,27%	2.570.126.152	4,92%
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	100,35%	-	-
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		100%	-	-

Untuk tahun 2024 penyerapan anggaran Kecamatan Mojoanyar mencapai 95,27% dari total Anggaran Kecamatan Mojoanyar tahun 2024 sebesar Rp. 2.697.656.026,00 dengan Realisasi Anggaran Rp. 2.570.126.152,00 atau dengan kata lain perencanaan penganggaran sudah dilakukan dengan sangat baik. Sedangkan sisa anggaran yang tidak dapat direalisasi sebesar Rp. 127.511.874,00 berasal dari SiLPA Belanja Gaji dan Tunjangan dan adanya efisiensi pengadaan barang dan jasa sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan sumber daya bisa dilakukan dengan sangat baik.

7. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dengan melihat persentase pencapaian kinerja tahun 2024 dan total penyerapan anggaran yang telah dilakukan maka dapat dipastikan semua program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Mojoanyar semuanya mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Mojoanyar tahun 2024.

B. Realisasi Anggaran

Sumber dana bagi pembiayaan pelaksanaan kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, untuk mendorong pencapaian Program, Sasaran, Tujuan, Misi dan Visi Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 adalah APBD Kabupaten Mojokerto. Kecamatan Mojoanyar

mengelola anggaran belanja dengan sumber dana dari APBD dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Operasi	: Rp	2.687.188.926,00
- Belanja Pegawai	: Rp	2.203.763.000,00
- Belanja Barang dan jasa	: Rp	483.425.926.00
- Belanja Hibah	: Rp	
Belanja Modal	: Rp	10.467.100,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	: Rp	-
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	: Rp	-
Jumlah Seluruh Anggaran Belanja	: RP	2.697.656.026,00

Persentase anggaran pada masing–masing sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan (total) anggaran Kecamatan Mojoanyar tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Realisasi Anggaran per Program

No	Sasaran Strategis	Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	27.590.850,00	27.324.850.00	100,97%
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	197.159.100	194.395.100.00	101,42%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.472.906.076.00	2.348.424.202,00	105,3%
		JUMLAH	2.697.656.026,00	2.570.126.152,00	95,27%

Sumber data LRA Kecamatan Mojoanyar TA. 2024

Pada Sasaran Strategis Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal ada 3 Program yang mendukung pencapaian sasaran tersebut, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, yang diampu oleh Kepala Seksi Pelayanan dengan anggaran sebesar Rp. 27.590.850,00 dan terealisasi sebesar Rp. 27.324.850,00 atau sebesar 99,04%. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa capaian kinerja dalam sasaran tersebut sangat baik. Menunjukkan bahwa perencanaan kinerja sudah dilakukan dengan seksama.
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa, yang diampu oleh 4 (empat) Kepala Seksi yakni Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi

Pembangunan, Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Kepala Seksi Kemasyarakatan dengan Anggaran Rp. 197.159.100,00 dan terealisasi sebesar Rp. 194.395.100,00 atau sebesar 98,60%. Dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja dalam Sasaran tersebut sangat baik. Menunjukkan bahwa Perencanaan Kinerja sudah dilakukan dengan seksama.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diampu oleh Sekretariat dengan Anggaran Rp. 2.472.906.076,00 dan terealisasi Rp. 2.348.424.202,00 atau sebesar 94,97%. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa Capaian Kinerja dalam Sasaran tersebut sangat baik. Menunjukkan bahwa Perencanaan Kinerja sudah dilakukan dengan seksama.

C. Tindak Lanjut Dan Evaluasi

Dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Mojoanyar Tahun 2024 ada satu (satu) Sasaran strategis yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal dengan indikator kinerja IKM Kecamatan dan ada empat (empat) kinerja lainnya yang tercantum di dalamnya, yaitu:

1. Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan dengan indikator kinerja Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan.
2. Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan dengan indikator kinerja Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti.
3. Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel. Ada 3 Indikator Kinerja yaitu:
 - 3.1. Nilai SAKIP Kecamatan
 - 3.2. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
 - 3.3. Indeks Profesionalitas ASN
4. Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah dengan indikator kinerja Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan.

Dalam mencapai Indikator Kinerja Utama tersebut Kecamatan Mojoanyar menjalankan 3 Program, 7 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 2.697.656.026,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.570.126.152,00 atau mencapai 95,27% dari target 97,5% yang telah ditetapkan di Perjanjian Kinerja.

Pada Sasaran Strategis Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal pada Indikator Kinerja IKM Kecamatan dengan target 90 terealisasi 97,87 sehingga capaian kinerjanya adalah 108,74%

Pada kinerja lainnya yang pertama yaitu Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan pada Indikator Kinerja Persentase Pelayanan yang

terlayani sesuai standar pelayanan dengan target 100% terealisasi 100% capaian kinerjanya adalah 100%.

Kinerja lainnya yang kedua yaitu Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan pada Indikator Kinerja Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dengan target kinerja 100% terealisasi 100% capaian kinerjanya adalah 100%.

Kinerja lainnya yang ketiga yaitu Meningkatnya Tata kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel pada Indikator Kinerja yang pertama yaitu Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja 81 terealisasi 80,30 capaian kinerjanya adalah 99,14%, Indikator Kinerja yang kedua yaitu Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah dengan target kinerja 97,5% terealisasi 95,27% capaian kinerjanya adalah 97,71%, Indikator Kinerja yang ketiga yaitu Indeks Profesionalitas ASN dengan target kinerja 85,15 terealisasi 85,46 capaian kinerjanya adalah 100,35%.

Kinerja lainnya yang keempat yaitu Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah, pada Indikator Kinerja Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dengan target kinerja 2 inovasi terealisasi 2 inovasi capaian kinerjanya adalah 100%.

Dengan hasil capaian kinerja yang ada, diharapkan mampu menjadi sumber informasi serta yang efektif bagi upaya perbaikan serta optimalisasi kinerja khususnya pada Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto serta bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto umumnya demi mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto selama tahun 2024 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto 2021-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja.

Pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2024 sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Terwujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	90	97,87	108,74%

No	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		100%	100%	100%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Kecamatan	81	80,30	99,14%
		3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	97,5%	95,27%	97,71%
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	85,15	85,46	100,35%
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		2 Inovasi	2 Inovasi	100%

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Kecamatan Mojoanyar di Tahun 2024 telah mencapai target yang telah ditentukan. Meskipun ada beberapa Indikator Kinerja yang tidak memenuhi target yaitu IKM Kecamatan. Diupayakan di tahun depan Indikator Kinerja tersebut dapat tercapai melalui monitoring dan evaluasi bertahap dan berjenjang serta sinergi yang baik antara atasan dan bawahan, serta komitmen bersama agar target kinerja dapat terpenuhi.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2024 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Kekurangan yang terjadi selama 2024 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya.

B. Saran

Demi tercapainya sasaran organisasi dan perbaikan di tahun yang akan datang, maka Kecamatan Mojoanyar perlu melakukan perbaikan-perbaikan antara lain:

1. Menambah Sumber Daya Manusia yang kompeten; dan
2. Menambah anggaran operasional dan penyediaan peralatan perlengkapan kantor yang memadai.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mojoanyar yang menggambarkan capaian kinerja tujuan dan sasaran pada tahun 2024 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto.


Mojokerto, 31 Januari 2025
Plt. CAMAT MOJOANYAR

ARIFATUR ROZIQ. S.STP., M.M.
Penata Tingkat I
NIP. 198607302006021001

LAMPIRAN – LAMPIRAN

MATRIK RENSTRA 2022- 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Pgram (outcome) dan Kegiatan (output	Data Capaian pada awal Perencanaan	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja Pengkat Daerah Penangung jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Optimal				Nilai IKM	80	81	3.292.922.261	81,25	3.523.426.819	81,50	3.770.066.697	81,75	4.033.971.365	82	4.316.349.361	82	18.936.736.503	Kec. Mojoanyar	Kec. Mojoanyar
	Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan			Indeks Kepuasan ASN terhadap layanan Kesekretariatan	80	81	3.072.922.261	81,25	3.288.026.819	81,50	3.518.188.697	81,50	3.764.461.905	82	4.027.974.239	82	17.671.573.921	Kec. Mojoanyar	Kec. Mojoanyar
		7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan ASN terhadap layanan Kesekretariatan	80	81	3.072.922.261	81,25	3.288.026.819	81,50	3.518.188.697	81,50	3.764.461.905	82	4.027.974.238	82	17.671.573.919	Kec. Mojoanyar	Kec. Mojoanyar
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kecamatan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu	10 dokumen	13 dokumen	12.000.000	13 dokumen	12.840.000	13 dokumen	13.738.800	13 dokumen	14.700.516	13 dokumen	15.729.552	65 dokumen	69.008.868	Kec. Mojoanyar	Kec. Mojoanyar
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	10 dokumen	7 dokumen	6.000.000	7 dokumen	6.420.000	7 dokumen	6.869.400	7 dokumen	7.350.258	7 dokumen	7.864.776	35 dokumen	34.504.434	Kec. Mojoanyar	Kec. Mojoanyar
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	N/A	6 dokumen	6.000.000	6 dokumen	6.420.000	6 dokumen	6.869.400	6 dokumen	7.350.258	6 dokumen	7.864.776	30 dokumen	34.504.434	Kec. Mojoanyar	Kec. Mojoanyar
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu	N/A	66 dokumen	2.699.922.261	66 dokumen	2.888.916.819	66 dokumen	3.091.140.997	66 dokumen	3.307.520.866	66 dokumen	3.539.047.327	330 dokumen/laporan	15.526.548.270	Kec. Mojoanyar	Kec. Mojoanyar

		7.01.0 1.2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	28 Doku men	2.676. 922.26 1	28 Doku men	2.864. 306.81 9	28 Doku men	3.064. 808.29 7	28 Doku men	3.279. 344.87 7	28 Doku men	3.508. 899.01 9	140 dokum en	15.394 .281.2 73	Kec. Mojoanyar	Kec. Mojoa nyar
		7.01.0 1.2.02. 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan keuangan bulanan	N/A	38 lapo- ran	23.000 .000	38 lapo- ran	24.610 .000	38 lapo- ran	26.332 .700	38 lapo- ran	28.175 .989	38 lapo- ran	30.148 .308	190 lapo- ran	132.26 6.997	Kec. Mojoanyar	Kec. Mojoa nyar
		7.01.0 1.2.05	Administras i Kepegawaia n Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi	N/A	27 stel	11.00 0.000	27 stel	11.77 0.000	27 stel	12.59 3.900	27 stel	13.47 5.473	27 stel	14.41 8.756	135 stel	63.25 8.129	Kec. Mojoanyar	Kec. Mojoa nyar
		7.01.0 1.2.05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	N/A	27 stel	11.00 0.000	27 stel	11.77 0.000	27 stel	12.59 3.900	27 stel	13.47 5.473	27 stel	14.41 8.756	135 stel	63.25 8.129	Kec. Mojoanyar	Kec. Mojoa nyar
		7.01.0 1.2.06	Administras i Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	80	81	155.0 00.00 0	82	165.8 50.00 0	83	177.4 59.50 0	84	189.8 81.66 5	85	203.1 73.38 1	85	891.3 64.54 6	Kec. Mojoanyar	Kec. Mojoa nyar
		7.01.0 1.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	1 paket	7.000. 000	1 paket	7.490. 000	1 paket	8.014. 300	1 paket	8.575. 301	1 paket	9.175. 572	5 paket	40.255 .173	Kec. Mojoanyar	Kec. Mojoa nyar
		7.01.0 1.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	80.000 .000	1 paket	85.600 .000	1 paket	91.592 .000	1 paket	98.003 .440	1 paket	104.86 3.681	5 paket	460.05 9.121	Kec. Mojoanyar	Kec. Mojoa nyar
		7.01.0 1.2.06. 04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	25.000 .000	12 bulan	26.750 .000	12 bulan	28.622 .500	12 bulan	30.626 .075	12 bulan	32.769 .900	60 bulan	143.76 8.475	Kec. Mojoanyar	Kec. Mojoa nyar
		7.01.0 1.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	1 paket	2 paket	10.000 .000	2 paket	10.700 .000	2 paket	11.449 .000	2 paket	12.250 .430	2 paket	13.107 .960	10 paket	57.507 .390	Kec. Mojoanyar	Kec. Mojoa nyar
		7.01.0 1.2.06. 06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	N / A	1 paket	3.000. 000	1 paket	3.210. 000	1 paket	3.434. 700	1 paket	3.675. 129	1 paket	3.932. 388	5 paket	17.252 .217	Kec. Mojoanyar	Kec. Mojoa nyar

		7.01.0 1.2.06. 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll	1 paket	1 paket	15.000 .000	1 paket	16.050 .000	1 paket	17.173 .500	1 paket	18.375 .645	1 paket	19.661 .940	5 paket	86.261 .085	Kec. Mojoanyar	Kec. Mojoanyar
		7.01.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	15.000 .000	12 bulan	16.050 .000	12 bulan	17.173 .500	12 bulan	18.375 .645	12 bulan	19.661 .940	60 bulan	86.261 .085	Kec. Mojoanyar	Kec. Mojoanyar
		7.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kantor	80	81	121.0 22.40 0	81,25	129.4 93.96 8	81,50	138.5 58.54 6	81,75	148.2 57.64 4	82	158.6 35.67 9	82	695.9 68.23 6	Kec. Mojoanyar	Kec. Mojoanyar
		7.01.0 1.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	36.000 .000	12 bulan	38.520 .000	12 bulan	41.216 .400	12 bulan	44.101 .548	12 bulan	47.188 .656	60 bulan	207.02 6.604	Kec. Mojoanyar	Kec. Mojoanyar
		7.01.0 1.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	N / A	5 THL	85.022 .400	5 THL	90.973 .968	5 THL	97.342 .146	5 THL	104.15 6.096	5 THL	111.44 7.023	25 THL	488.94 1.632	Kec. Mojoanyar	Kec. Mojoanyar
		7.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	80	81	73.97 7.600	81,25	79.15 6.032	81,50	84.69 6.954	81,75	90.62 5.741	82	96.96 9.543	82	425.4 25.87 0	Kec. Mojoanyar	Kec. Mojoanyar
		7.01.0 1.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan	2 unit	2 unit	30.000 .000	2 unit	32.100 .000	2 unit	34.347 .000	2 unit	36.751 .290	2 unit	39.323 .880	10 unit	172.52 2.170	Kec. Mojoanyar	Kec. Mojoanyar
		7.01.0 1.2.09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	3 unit	3 unit	35.977 .600	3 unit	38.496 .032	3 unit	41.190 .754	3 unit	44.074 .107	3 unit	47.159 .295	15 unit	206.89 7.788	Kec. Mojoanyar	Kec. Mojoanyar
		7.01.0 1.2.09. 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	Jumlah jenis pemeliharaan rutin/	1 paket	1 paket	8.000 .000	1 paket	8.560 .000	1 paket	9.159 .200	1 paket	9.800 .344	1 paket	10.486 .368	5 paket	46.005 .912	Kec. Mojoanyar	Kec. Mojoanyar

			dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	berkala peralatan gedung kantor															
	Terwujudnya pelayanan publik yang optimal	7.01.02		IKM Kecamatan	81	81	220.000.000	81,25	235.400.000	81,50	251.878.000	81,75	269.509.460	82	288.375.122	82	1.265.162.582	Kec. Mojoanyar	Kec. Mojoanyar
		7.01.02.2.04.01	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81	81	20.000.000	81,25	21.400.000	81,50	22.898.000	81,75	24.500.860	82	26.215.920	82	115.014.780	Kec. Mojoanyar	Kec. Mojoanyar
		7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	N / A	605 pelayanan	20.000.000	605 pelayanan	21.400.000	605 pelayanan	22.898.000	605 pelayanan	24.500.860	605 pelayanan	26.215.920	4.025 pelayanan	115.014.780	Kec. Mojoanyar	Kec. Mojoanyar
		7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	N / A	5 pelayanan	5.000.000	5 pelayanan	5.350.000	5 pelayanan	5.724.500	5 pelayanan	6.125.215	5 pelayanan	6.553.980	25 pelayanan	28.753.695	Kec. Mojoanyar	Kec. Mojoanyar
		7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	N / A	600 pelayanan	15.000.000	600 pelayanan	16.050.000	600 pelayanan	17.173.500	600 pelayanan	18.375.645	600 pelayanan	19.661.940	3.000 pelayanan	86.261.085	Kec. Mojoanyar	Kec. Mojoanyar
		7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	81	81	200.000.000	81,25	214.000.000	81,50	228.980.000	81,75	245.008.600	82	262.159.202	82	1.150.147.802	Kec. Mojoanyar	Kec. Mojoanyar

				Masyarakat serta Kesejahteraan Masyarakat															
		7.01.0 6.2.01	Fasilitasi, Rekomenda si dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah an Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketertarikan, ketertarikan umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan Masyarakat	81	17 fasilit asi	200.0 00.00 0	17 fasilit asi	214.0 00.00 0	17 fasilit asi	228.9 80.00 0	17 fasilit asi	245.0 08.60 0	17 fasilit asi	262.1 59.20 2	85 fasilit asi	1.150. 147.8 02	Kec. Mojoanyar	Kec. Mojoa nyar
		7.01.0 6.2.01. 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah an Desa	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 jenis	17 fasili- tasi	40.000 .000	17 fasili- tasi	42.800 .000	17 fasili- tasi	45.796 .000	17 fasili- tasi	49.001 .720	17 fasili- tasi	52.431 .840	85 fasili- tasi	230.02 9.560	Kec. Mojoanyar	Kec. Mojoa nyar
		7.01.0 6.2.01. 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembanguna n Daerah dengan Pembanguna n Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3 jenis	17 fasili- tasi	25.000 .000	17 fasili- tasi	26.750 .000	17 fasili- tasi	28.622 .500	17 fasili- tasi	30.626 .075	17 fasili- tasi	32.769 .900	85 fasili- tasi	143.76 8.475	Kec. Mojoanyar	Kec. Mojoa nyar
		7.01.0 6.2.01. 11	Fasilitasi Penyelenggara an Ketenterama n dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 jenis	17 fasili- tasi	35.000 .000	17 fasili- tasi	37.450 .000	17 fasili- tasi	40.071 .500	17 fasili- tasi	42.876 .505	17 fasili- tasi	45.877 .860	85 fasili- tasi	201.27 5.865	Kec. Mojoanyar	Kec. Mojoa nyar
		7.01.0 6.2.01. 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarak atan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 jenis	17 fasili- tasi	100.00 0.000	17 fasili- tasi	107.00 0000	17 fasili- tasi	114.49 0.000	17 fasili- tasi	122.50 4.300	17 fasili- tasi	131.07 9.601	85 fasili- tasi	575.07 3.901	Kec. Mojoanyar	Kec. Mojoa nyar

MATRIK RENCANA KERJA TAHUN 2024

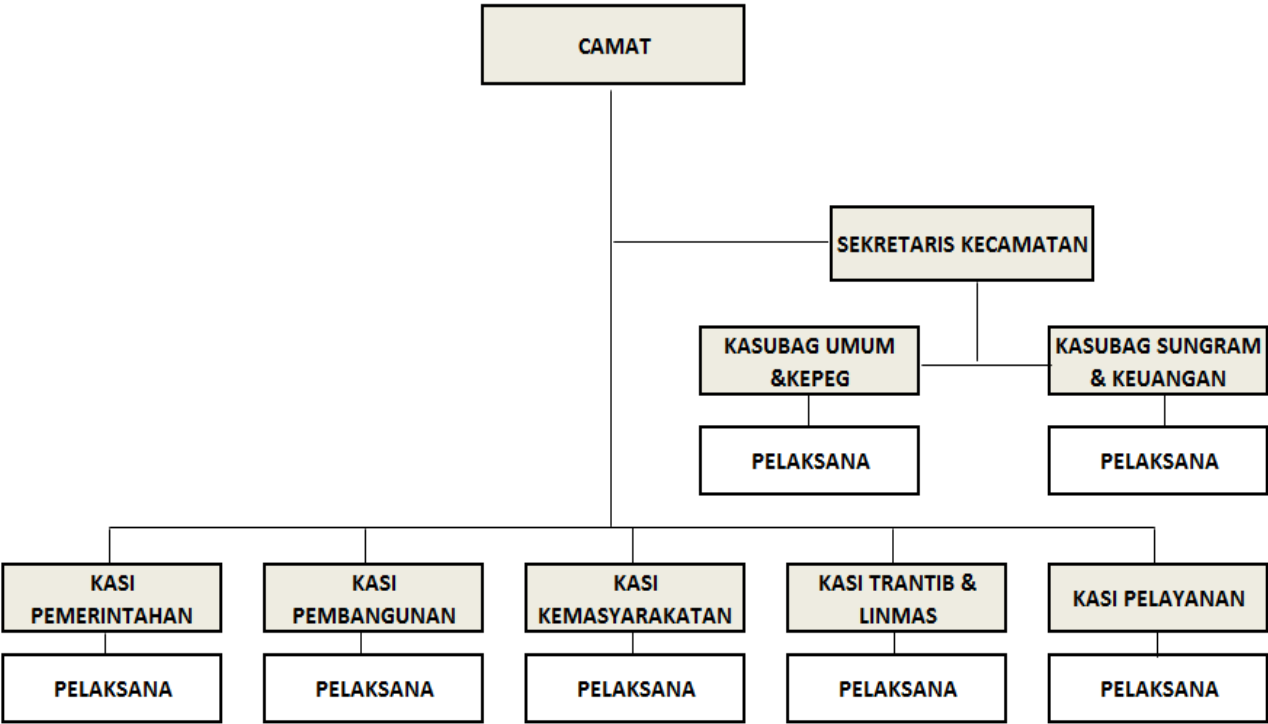
Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Anggaran (Rp.)		
							APBD	P-APBD	APBD	P-APBD	Selisih
7					UNSUR KEWILAYAHAN						
7	1				KECAMATAN						
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	89	90	2.594.180.986	2.697.656.026	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang tercapai sesuai target	82%	100%	12.500.000	11.922.200	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dapat tersusun	7 Dokumen	7 dokumen	7.500.000	7.072.000	
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 laporan	5.000.000	4.850.200	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		100%	2.053.507.960	2.181.983.000	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/Bulan	18 orang/bulan	2.053.507.960	2.181.983.000	
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah		12 bulan	-	-	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan		6 jenis	102.871.200	99.914.400	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	7 paket	5.000.000	4.997.800	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 Paket	12 paket	15.000.000	14.309.500	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	1 paket	30.000.000	28.417.600	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 paket	3 Jenis	5.000.000	4.999.700	
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan	3 Dokumen	2 paket	3.271.200	3.271.200	

7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	4 Paket	12 laporan	15.000.000	14.318.600	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100%	29.600.000	29.600.000	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan		100%	131.428.800	131.428.000	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	24 Laporan	24 laporan	57.028.800	57.028.800	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	74.400.000	74.400.000	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik		100%	60.073.026	47.658.476	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit	2 unit	43.073.026	42.908.476	
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	3 Unit	2 unit	12.250.000	-	
7	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 Unit	1 paket	4.750.000	4.750.000	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	82%	100%	28.000.000	27.590.850	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	975 pelayanan	975 Pelayanan	28.000.000	27.590.850	
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	975 pelayanan	975 pelayanan	28.000.000	27.590.850	
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	82%	100%	205.800.000	197.159.100	

7	1	6	2.01		Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan. Pembangunan. ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. kesejahteraan masyarakat	24 Fasilitasi	24 dokumen	205.800.000	197.159.100	
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	12 dokumen	35.000.000	33.138.150	
7	1	6	2.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah DokumenSinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 Dokumen	4 dokumen	35.000.000	33.256.450	
7	1	6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	4 dokumen	51.800.000	47.799.700	
7	1	6	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas. Fungsi. dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas. Fungsi. dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	4 dokumen	84.000.000	80.964.800	
TOTAL									2.594.180.986	2.697.656.026	

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MOJOANYAR

Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN MOJOANYAR KABUPATEN MOJOKERTO

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	89

N O	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		100%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti		100%
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 (A)
		3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	97,5%
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	85,15 (Tinggi)
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		2 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 2.360.380.986.00	APBD 2024
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 28.000.000,00	APBD 2024
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 205.800.000,00	APBD 2024

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN MOJOANYAR KABUPATEN MOJOKERTO

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	90

N O	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		100%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti		100%
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 (A)
		3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	97,5%
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	85,15 (Tinggi)
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		2 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 2.472.906.076,00	P APBD 2024
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 27.590.850,00	P APBD 2024
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 197.159.100,00	P APBD 2024